Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10 No 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986



PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP TINGKAT KESADARAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN SAMPAH DI KELURAHAN BAHU

Rasti Lestari Parannu[1], Welson Yappi Rompas[2], Helly Febrina Kolondam[3]

[123] Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sam Ratulangi Manado

ARTICLE INFO

Article history:
Received Januari 2026
Revised Januari 2026
Accepted Januari 2026
Available Januari 2026

rastiparannu@gmail.com
yappirompas@unsrat.ac.id
hellykolondam1102@gmail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi kebijakan terhadap tingkat kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah di Kelurahan Bahu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuesioner. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan Edward III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi, serta teori kesadaran masyarakat menurut Notoatmodjo yang meliputi pengetahuan, perilaku, dan sikap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berpengaruh terhadap tingkat kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah di Kelurahan Bahu. Berdasarkan hasil uji regresi dan koefisien korelasi diperoleh nilai konstanta sebesar 6,507 yang bernilai positif, menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh. Nilai koefisien variabel dependen sebesar 0,697 dan nilai R sebesar 0,702 yang mendekati 1, sehingga menunjukkan pengaruh yang kuat. Hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 9,708 yang lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,984. Dengan demikian, hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima, yang berarti terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen dan variabel dependen.
Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan; Kesadaran Masyarakat

A B S T R A C T

This study aims to determine the effect of policy implementation on the level of public awareness in waste management in Bahu Village. The research method used is quantitative research. Data collection techniques include interviews, observation, documentation, and questionnaires. The theoretical framework is based on Edward III's policy implementation theory, which consists of communication, resources, disposition or attitude, and bureaucratic structure, as well as Notoatmodjo's public awareness theory, which includes knowledge, behavior, and attitude. The results show that policy implementation has an effect on the level of public awareness in waste management in Bahu Village. Based on regression analysis and correlation coefficient results, the constant value is 6.507, indicating a positive effect of the independent variable. The coefficient value of the dependent variable is 0.697, and the R value is 0.702, which is close to 1, indicating a strong relationship. The t-test results show a significance value of 0.001, which is less than 0.05, and a t-count value of 9.708, which is greater than the t-table value of 1.984. Therefore, the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted, indicating a significant effect between the independent and dependent variables.
***Keywords**: Implementation; Policy; Public Awareness*

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10 No 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



1. PENDAHULUAN

Kehidupan manusia selalu menghasilkan sampah dari berbagai kegiatan. Sampah menjadi masalah besar di seluruh dunia dan Indonesia, karena jumlah manusia terus bertambah, sehingga sampah semakin banyak. Kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam menangani sampah masih rendah. Pemerintah sudah membuat kebijakan untuk mengelola sampah, namun partisipasi masyarakat sangat penting agar kebijakan itu efektif. Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbesar di dunia menurut UNEP, dan terakhir di ASEAN dalam pengelolaan sampah. Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan timbulan sampah di 320 kabupaten/kota pada tahun 2023 sebanyak 34.630.115,78 ton per tahun, dan di 323 kabupaten/kota pada tahun 2024 sebanyak 35.313.107,58 ton per tahun. (Website SIPSN, di akses 17 September 2025) Pemerintah menangani sampah berdasarkan peraturan seperti Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, serta peraturan menteri seperti Permen LHK No. 1 Tahun 2024 tentang Penanganan Sampah Akibat Bencana dan Permen LHK No. 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah. (website BPK RI, diakses 16 September 2025) Dari total sampah 35,31 juta ton pada tahun 2024, hanya 37,53% yang ditangani, sementara 61,37% atau 21,67 juta ton tidak dikelola dan dibuang ke tempat terbuka yang mencemari lingkungan. Dari 550 tempat pembuangan akhir (TPA), 343 unit tidak beroperasi untuk menghentikan pembuangan terbuka. Tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025 adalah "Akhiri Polusi Plastik," dan Menteri Hanif menyebutkan sekitar 10,8 juta ton sampah plastik (hampir 20% dari total), dengan tingkat daur ulang hanya 22%. Jawa memiliki tingkat daur ulang tertinggi (31%), diikuti Bali-Nusra (22,5%) dan Sumatera (12%), sedangkan Indonesia Timur masih menghadapi tantangan besar. (Website SIPSN, di akses 17 September 2025) Situasi di Sulawesi Utara dan Kota Manado Di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2024, timbulan sampah mencapai 505.276,76 ton per tahun, dengan penanganan 277.485,96 ton (33,09%), pengurangan 34.832,01 ton (6,89%), terbuang ke lingkungan 192.858,30 ton (38,19%), dan TPA open dumping 110.310,30 ton (21,87%). (Sosialisasi di kantor Walikota 17 September 2025). Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Akhir Daerah mulai berlaku tanggal 28 November 2022, untuk mengatur lokasi TPA regional. (Website Tribun Manado, di akses 18 September 2025) Di Kota Manado pada tahun 2024, timbulan sampah 134.741 ton per tahun, pengurangan 9.355,89 ton (8,66%), dan penanganan 90.520 ton (83,77%). (17 September 2024). Perda No. 1 Tahun 2021 mengatur tanggung jawab dan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pada kelurahan Bahu di Kecamatan Malalayang, Kota Manado, masih menghadapi masalah sampah, dimana truk sampah mengangkut sampah dua kali sehari, masing-masing 5 kubik, sehingga timbulan sampah 10 kubik per hari (2 ton). Sehingga, sampah plastik yang dikelola hanya 10-20% (0,2-0,4 ton per hari), sementara 80-90% (1,6-1,8 ton per hari) tidak dikelola. (15 September 2025). Penduduk Kelurahan Bahu berjumlah 7.439 jiwa. (22 Agustus 2025) Pemerintah Kota Manado meluncurkan program seperti peningkatan armada pengangkut sampah, JUMPA JAS (Jumat Pagi Angka Sampah) untuk ASN, penyediaan 251 unit sampah motor dan 67 truk sampah, serta penataan TPA dan penghargaan untuk daur ulang. Ini sesuai Perda No. 1 Tahun 2021 yang mewajibkan pemilahan sampah organik dan non-organik dengan prinsip 3R (kurangi, gunakan ulang, daur ulang) untuk membuat kompos, eco-enzyme, eco-brick, dan produk ekonomis. (Kilis dkk., 2024:12). Hal ini sejalan dengan teori Edward III tentang penerapan kebijakan berdasarkan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Tabel jumlah penduduk Kelurahan Bahu:

No	Lingkungan	L	P	Jumlah
1	1	296	290	586
2	2	531	520	1051
3	3	257	255	512
4	4	81	92	173
5	5	293	265	558
6	6	708	667	1375
7	7	577	569	1146
8	8	535	532	1067
9	9	474	464	938

Sumber: Data Penduduk Terakhir Kelurahan Bahu

Penduduk di Kelurahan Bahu cukup padat, dan sampah menjadi masalah besar. Wawancara menunjukkan kesadaran masyarakat rendah: banyak yang membuang sampah sembarangan di lorong, selokan, atau tempat sepi, seperti botol minuman. Kesadaran untuk memilah sampah juga be organik dan non-organik. (Wawancara 22 Agustus 2025) Ini sesuai teori kesadaran masyarakat Notoatmodjo, yang tekanan pengetahuan dan pemahaman hak serta tanggung jawab sebagai warga negara, serta kesadaran diri terhadap lingkungan. (Notoatmodjo, 2007:150) Sehingga Implementasi kebijakan pemerintah diharapkan dapat mengatasi masalah sampah dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah. Namun, di lapangan sampah, masih menjadi masalah karena kesadaran rendah. Penelitian ini mengkaji apakah implementasi kebijakan mempengaruhi kesadaran masyarakat di Kelurahan Bahu. Metode yang digunakan adalah kuantitatif, untuk mengukur variabel implementasi kebijakan (independen) dan kesadaran masyarakat (dependen) secara objektif dan statistik.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh (Budiharjo, 2017) Pengaruh Kesadaran Masyarakat Terhadap Partisipasi Penanganan Kebersihan Lingkungan di Kelurahan Menteng Jakarta Pusat. Peneliti menggunakan metode Eksplanatif dalam hal ini untuk menguji hipotesa yang berhubungan dengan sebab akibat antara variabel, dengan menggunakan teori ksadaran masyarakat dari Notoatmodjo (2008) ada tiga dimensi yaitu; Pengetahuan, Perilaku dan Sikap. Adapun masalah yang mendasari yaitu kurangnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan dan masih menggunakan pla perilaku lama. Sehingga temuan dari penelitian ini bahwa variabel kesadaran masyarakat berpengaruh positif cukup terhadap variabel partisipasi masyarakat di Kelurahan Menteng Jakarta Pusat.

Penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa Alya Puspita, Ike Rachmawati dan Hegia Sampurna. Dengan judul Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Terhadap Partisipasi Masyarakat di Kota Sukabumi (2023). Peneliti menggunakan metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan menyebarkan kuisioner kepada masyarakat dan teori yang digunakan

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10 No 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



peneiti yaitu Edward III yaitu: Komunikasi, Sumber daya, Disposisi/Sikap dan Struktur Birokrasi. Masalah yang mnjadi dasar penelitian ini yaitu kebijakan pengelolaan sampah di Kota Sukabumi belum memberikan hasil yaitu menurunnya timbulan sampah tiap tahunnya. Adapun temuan yang didapatkan dari penelitian ini yaitu, implementasi kebijakan dan partisipasi masyarakat dikategorikan tinggi. Kemudian, terdapat pengaruh positif dan signifikan implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang berdasar pada dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap partisipasi masyarakat.

Implementation

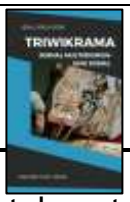
Kata " ***Implementation*** " dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti melakukan atau menerapkan sesuatu. Biasanya, implementasi dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Kamus Webster, "melaksanakan" berarti menyediakan cara untuk melaksanakan sesuatu dan mewujudkannya atau memberikan dampak. (Yuliah, E., 2020). Sehubungan dengan itu implementasi merupakan semua kegiatan yang berupa pelaksanaan dari sebuah aturan atau undang-undang yang telah ditetapkan .(Pramono, 2020). Adapun Menurut Gerston (1992). Implementasi adalah tugas administratif untuk mengubah komitmen kebijakan menjadi tindakan nyata. Dalam proses pembuatan kebijakan publik, implementasi berarti mengubah keputusan yang telah dibuat menjadi implementasi atau penerapan di lapangan.(Nurmayana, 2022). Sejalan dengan hal tersebut, menurut Van Meter dan Van Horn (1975) implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok pemerintahan, atau pihak swasta yang bertujuan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. (Subianto, 2020). Oleh karena itu, implementasi adalah langkah-langkah nyata yang diambil oleh pemerintah untuk melaksanakan suatu rencana dalam hal ini aturan guna mencapai suatu tujuan.

Policy

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ***Policy*** adalah kumpulan gagasan dan aturan dasar yang menjadi pedoman dalam melaksanakan pekerjaan, memimpin, atau bertindak, baik dalam pemerintahan, organisasi, maupun bidang lainnya. Kebijakan juga memuat pernyataan tujuan, prinsip, dan pedoman yang membantu manajemen mencapai tujuan yang diinginkan.(Abdal, 2015). Tidak hanya itu, kebijakan adalah serangkaian tindakan terencana untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Tindakan-tindakan ini muncul dari suatu proses yang melibatkan hubungan antarorganisasi dan peran para pembuat kebijakan. (Kertati et al., 2023) Kebijakan terdiri dari keputusan-keputusan spesifik yang dibuat untuk mencapai tujuan dengan cara-cara tertentu.(Syamsul Alam et al., 2025).Tindakan-tindakan ini biasanya dilakukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang di dalamnya terdapat tantangan dan peluang untuk mengimplementasikan usulan kebijakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Permatasari et al., 2022). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan tindakan yang direncanakan dan melibatkan hubungan antar organisasi dan peran pembuat kebijakan yang diharapkan setelah dilaksanakan dapat memberikan capaian tujuan yang telah dirancangkan. Tak hanya itu kebijakan juga merupakan serangkaian keputusan yang dibuat oleh individu atau kelompok dalam hal ini pemerintah untuk menentukan tujuan dan cara mencapainya.

Policy Implementation

Policy Implementation sendiri terdiri dari dua kata, yaitu '***Implementation***' dan '***Policy***'. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan berasal dari kata "bijaksana", yang berarti aturan yang mengatur tindakan dan mempengaruhi pelaksanaan suatu kegiatan. Sementara itu, 'publik' berarti "masyarakat umum". (Fauzan, 2024). Sehingga dapat diartikan, bahwa kebijakan publik adalah serangkaian prinsip dasar yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam mengambil tindakan. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah memiliki tujuan spesifik dan diharapkan memiliki dampak yang luas. Untuk mencapai tujuan tersebut, suatu kebijakan harus melalui beberapa langkah yang saling terkait, mulai dari formulasi, implementasi, hingga evaluasi. (Abdal, 2015)



Adapun, kebijakan publik adalah aturan atau rencana yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan bersama. Sederhananya, kebijakan publik adalah bagaimana pemerintah membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk mengatasi isu-isu yang penting bagi masyarakat. Kebijakan dibuat untuk mengatasi isu-isu yang dirasakan oleh publik. (Hasbi et al., 2016). Oleh karena itu implementasi kebijakan merupakan cara untuk memastikan bahwa suatu kebijakan mencapai tujuannya didasari oleh masalah. Ada dua cara untuk melaksanakan kebijakan publik, yaitu dengan melaksanakan program secara langsung atau dengan menciptakan kebijakan turunan dari kebijakan publik yang telah ada sebelumnya

Public Awareness

Public Awareness sendiri terdiri terdiri dari dua kata yaitu '*Public' dan ' Awareness* '.'*Awareness'*, yang dapat didefinisikan sebagai persepsi atau pengetahuan tentang suatu peristiwa, diterima sebagai langkah awal, yang menjalankan fungsi yang diperlukan dalam kemungkinan perubahan perilaku dan pendidikan yang sukses, terutama jika terkait lingkungan, (Debrah et al., 2021) Adapun '*Public'* adalah sekelompok orang yang telah hidup dan bekerja bersama dalam jangka waktu yang cukup lama untuk membentuk suatu organisasi yang mengatur setiap individu di dalamnya, dan memungkinkan individu untuk mengatur diri mereka sendiri serta melihat diri mereka sebagai bagian dari kelompok sosial dengan batas-batas tertentu. (Maryani et al., 2020:2-4), Adapun karakteristik dari masyarakat yaitu, sebagai berikut: (a) Masyarakat merupakan kumpulan unit biologis di mana setiap anggotanya dapat bereproduksi dan melakukan berbagai aktivitas. b) Masyarakat memiliki wilayah atau area tertentu. c) Masyarakat memiliki cara atau bahasa sehari-hari untuk berkomunikasi satu sama lain. d) Terdapat perbedaan antara anggota masyarakat dan non-anggota. e) Mereka bersama-sama menghadapi atau menghindari ancaman dari musuh. Suhaimin Taidin Notoatmodjo (2008) dalam (Rachmawati, 2019) Kesadaran publik berarti bahwa orang-orang dalam suatu kelompok mengetahui dan memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Kesadaran juga berkaitan dengan pengetahuan dan kesadaran diri. Ini berarti bahwa seseorang memahami keadaan di sekitarnya dan merasa tergerak olehnya.

2. METODE

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif. Metode Kuantitatif yang dimana dapat menguji teori-teori tertentu, dengan cara meneliti Pengaruh atau hubungan antar Variabel.(Sugiyono, 2020). Lokasi penelitian ini yaitu berlokasi di Kelurahan Bahu, yang berada di Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, Kecamatan Malalayang. Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat Kelurahan Bahu sebanyak 7439 jiwa dengan menghitung ukuran sampel menggunakan rumus Solvin sebanyak 99 jiwa saja. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel menggunakan metode *Protability Sampling* dengan teknik *Simple Random Sampling*. *Protability Sampling* teknik pengambilan sampel ini mengartikan bahwa setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai bagian dari sampel (Sugiyono, 2020:82).Alasan penulis menggunakan teknik pengumpulan *Simple Random Sampling* atau acak sederhana, karena populasi masyarakat di Kelurahan Bahu memiliki jangkauan wilayah yang luas. Maka untuk menghemat waktu, biaya dan tenaga penelitian, sehingga metode *Teknik Simple Random Sampling* sangat cocok dalam pengumpulan Sampel.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. (a) Data Primer; Dalam penelitian ini data primer yang digunakan peneliti adalah kuesioner yang akan di sebarkan kepada objek melalui google form atau formulir online/offline dalam jangka waktu tertentu (Sugiyono, 2020). Hasil dari data kuesioner dikumpulkan dan di olah sendiri oleh peneliti. (b) Data Sekunder; Dalam penelitian ini data sekunder di perolah dari buku, jurnal maupun skripsi terdahulu yang merupakan definisi, teori-teori pendukung dalam penilitian ini juga peneliti

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10 No 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

menggunakan diantaranya, Website Berita, Website BPS serta skripsi dan jurnal terdahulu (Sugiyono, 2020).

Teknik pengumpulan ddata dalam penelitian ini yaitu: (a) Wawancara (Interview); Tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi (b) Observasi; Pengumpulan data dengan melihat secara langsung kejadian di lokasi. (c)Dokumentasi; berupa data gambar, dokumen-dokumen dan tulisan-tulisan. (d) Kuesioner; Pernyataan tertulis dan dijawab oleh responden Dalam penelitian ini, peneliti membuat kuesioner dengan pernyataan tentang identitas subjek dan pernyataan-pernyataan lain yang diharapkan dapat memberi informasi yang diberikan responden dan mengurai tentang variabel dan juga menjawab rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

Adapun instrumen dalam penelitian ini adalah dengan kuesioner. Instrumen Penelitian dalam penelitian ini dengan menggunakan kuesioner yang telah disusun secara tersturktur dan mengacu pada variabel penelitian, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden untuk menjawab. Menurut (Sugiyono, 2020:102) Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dalam penelitian ini, peneliti akan membuat kuesioner dengan pertanyaan tentang identitas subjek, dan pertanyaan-pertanyaan lain yang meminta responden untuk menjawab dimana pertanyaan yang diberikan menggambarkan dan menguraikan tentang variabel dan juga menjawab rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Dengan menggunakan SPSS 30.00 untuk melakukan pengujian data kuesioner yang telah dikumpulkan peneliti dari responden.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Berdasarkan dari olah data yang dilakukan peneliti dengan menggunakan SPSS 30.00 dapat disimpulkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut

a. Uji Regresi sederhana

	B	t	Sig.
(Constant)	6.507	1.436	0.154
implementasi kebijakan	0.697	9.708	<.001

dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh variabel Independen terhadap variabel Dependen pada penelitian ini yaitu: Y= a + bX Y = 6.507 + 0.697 Y= 7.204 Sehingga dapat disimpulkan Nilai konstanta= 6.507, nilai konstanta positif menunjukan Variabel independent naik atau berpengaruh dalam satu-satuan, maka variabel implementasi kebijakan akan naik dan terpenuhi. Adapun nilai koefisien pada variabel dependen, yaitu positif menunjukkan sebesar 0.697, yang berarti variabel kesadaran masyarakat dengan variabel implementasi kebijjakan memiliki penurunan sebesar 0.697.Adapun untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara parsial terhadap variabel Y. Nilai R berkisar antara 0 sampai 1, nilai semakin mendekati 1 berarti pengaruh yang terjadi semakin kuat, sebaliknya nilai semakin mendekati 0 maka pengaruh yang terjadi semakin lemah, dengan mengunakan uji korelasi, sebagai berikut:

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.702[a]	0.493	0.488	7.910

Dapat di lihat bahwa nilai R sebesar 0.702 yang dimana semakin mendekati 1, sehingga dapat diartikan berpengaruh kuat. Adapun nilai Adjusted R Square sebesar 0.488 yang berarti bahwa variabel X mempengaruhi variabel Y sebesar 48,8 % saja. Sedangkan sisanya 51,2% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak terdapat pada penelitian ini

b. Uji t

Uji T bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat atau tidak terdapat pengaruh parsial (sendiri) yang diberikan Variabel Independen/Bebas (X) terhadap Variabel Dependen/Terikat (Y). Adapun dasar pengambilan keputusan yaitu sebbagai berikut:

(1) Jika, t hitung > t tabel atau sig.< 0,05: Tolak hipotesis nol (H_0), terima hipotesis alternantif ($H\alpha$). Memiliki arti, terdapat pengaruh Variiabel X secara parsial.

(2) Jika, t hitung < t tabel atau sig.>0,05: Terima hipotesis nol (H_0), tolak hipotesis alternantif ($H\alpha$). Memiliki arti bahwa tidak terdapat pengaruh variabel X secara parsial (sendiri) terhadap variabel Y. Adapun hasil Uji T pada penelitian ini yaitu dapat dilihat pada berikut ini: Rumus t tabel: =(a/2;n-k-1) = (0,05/2:99-1-1) = (0,025:99-1) =98 =1.984

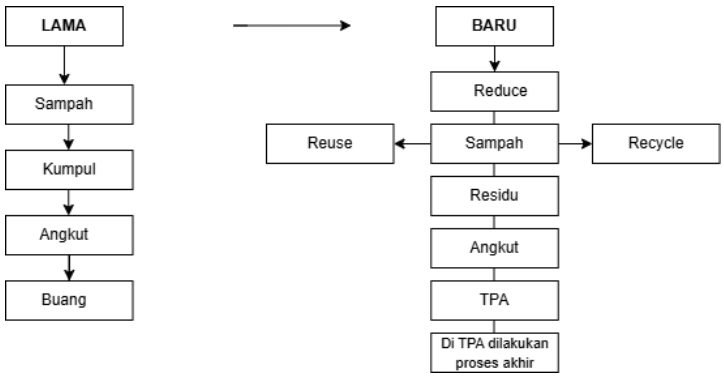
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	6.507	4.532		1.436	0.154
	implementasi kebijakan	0.697	0.072	0.702	9.708	<.001

Berdasarkan pengujian yang dilakukan baik dari penggujian letak t tabel dan hasil uji t memberikan kesimpulan terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel X tterhadap variabel Y yaitu sebesar 0,001 lebiih besar kecill dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 9,708 lebih besar dari nilai t tabel yaitu 1,984. Sehingga dapat disimpulkan sesuai dengan dasar pengambilan keputusan .yaitu t hitung > t tabel atau sig.< 0,05: Tolak hipotesis nol (H_0), terima hipotesis alternantif ($H\alpha$). Memiliki arti, terdapat pengaruh Variabel X secara parsial (sendiri) dan bahwa penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan antara Variabel Independen terdapat Variabel dependen.

Program Penanggaan Sampah

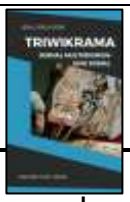
Peraturan Penanganan Sampah di Kota Manado Pada wawancara yang dilakukan peneliti kepada Kepala Bidang PSLB3 DLHD Prov. Sulut, Kepala Kebersihan Kecamatan Malalayang, dan Sekretaris Lurah Kelurahan Bahu dengan tema pertanyaan mengenai program penanganan sampah dan kesadaran masyarakat didapatkan hasil wawancara sebagai berikut; Program yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Utara yang dimana terdapat Paradigma Pengelolaan Sampah sebagai berikut:

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10 No 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Sumber: Data Primer dari Narasumber pada (17 September 2025)

Adapun program yang dilakukan pada Bulan September 2025 yaitu, Melakukan sosialisasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kantor Walikota. Tak hanya itu Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan dengan mewajibkan setiap Kota dan kabupaten mencatat timbunan sampah secara berkala, dan melakukan acara Adipura kebersihkan kota yang saat ini sedang berjalan. Adapun pengelolaan sampah dalam hal ini sampah plastic dengan pembuatan Bank sampah di beberapa titik. program JUMPA JAS (Jumat Pagi Angka Sampah), yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berpartisipasi dalam menjaga kebersihan dengan mengelola sampah rumah tangga mereka. sesuai dengan Perda No. 1 Tahun 2021 yang mewajibkan pemilahan sampah dari sumbernya, melakukan pemilahan sampah organik dan non-organik dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang dapat menghasilkan kompos, eco-enzyme, eco-brick, dan produk bernilai ekonomis. Selain itu, pemerintah kota juga melakukan penataan tempat pembuangan akhir (TPA) dan memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berinisiatif melakukan daur ulang sampah Di mana Kelurahan Bahu di naungi oleh bank sampah yang ada di kantor kecamatan Malalayang. Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Sampah yang di hasilkan oleh Kelurahan Bahu mencapai timbulan sampah sebanyak 10 kubik perharinnya sama dengan 2 ton/hari dan yang dikelola dalam hal ini sampah plastik sekitar 10-20% atau sama dengan 0,2 ton- 0,4 ton/hari yang dikelola. Sehingga 90-80% sampah atau sekitar 1,8 ton- 1,6 ton/hari yang tidak dikelola (15 September 2025). Peraturan Daerah (Perda) Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah. (Pasal 9) : Setiap orang harus mengurangi dan menangani sampah dengan cara ramah lingkungan, serta menjaga kebersihan di sekitarnya. Hal ini dilakukan dengan ikut mengurangi aktif sampah, menyediakan wadah sampah yang sesuai standar ramah lingkungan, menggunakan bahan yang bisa didaur ulang atau mudah hancur oleh alam, dan menyediakan wadah sampah terpisah di kendaraan umum, pribadi, fasilitas umum, kantor, perusahaan, dan pusat belanja. Kewajiban Pelaku Usaha (Pasal 13) : Pelaku usaha harus mengurangi sampah dari kegiatan mereka. Caranya adalah dengan menggunakan bahan produksi atau kemasan yang tidak banyak menghasilkan sampah, memilih bahan yang bisa digunakan ulang, didaur ulang, atau mudah hancur oleh alam, mendaur ulang sampah dengan teknologi yang aman, berusaha mengurangi sampah untuk membuat produk atau energi, serta menggunakan bahan daur ulang sebagai bahan baku dan menampung kemasan bekas dari konsumen. Larangan (Pasal 50) : Setiap orang dilarang membuang sampah sembarangan, seperti tidak di tempat yang sudah disediakan, atau ke saluran air, sungai, laut, jalan, trotoar, dan tempat umum lainnya. Juga dilarang membuang sampah besar atau membuang bangunan ke tempat pengolahan sampah tertentu, merusak atau membakar wadah sampah, membakar sampah tanpa aturan teknis yang benar, atau mengolah sampah akhir dengan cara yang melanggar aturan hukum. Sanksi Administratif : Orang atau badan usaha yang melanggar aturan di Pasal 12 ayat 2 sampai 5, Pasal 13, dan Pasal 50 dapat dikenakan denda atau sanksi lain. Sanksi ini bisa berupa teguran lisan, teguran tertulis, paksaan dari pemerintah, denda uang, pencabutan izin, atau penutupan usaha. Adapun ketentuan hukum pidana (Pasal 53) : Orang yang melanggar Pasal 13 dan Pasal 50 ayat 1



bisa dihukum kurungan paling lama 6 bulan atau denda sampai Rp50 juta. Ini dianggap sebagai pelanggaran ringan. Pada Kelurahan Bahu sendiri memiliki program penanganan sampah yang selaras dengan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala seksi kebersihan Kecamatan Malalayang, yang secara langsung berkoordinasi dengan kepala-kepala lingkungan untuk program penanganan sampah. Dalam hal ini melakukan pengangkatan Sampah setiap pagi di jam 06.00 pagi dan masyarakat diberikan himbauan untuk melakukan pemilahan sampah sisa makanan dan sampah plastik, sebelum meletakkan sampah di muka rumah atau pagar. Adapun ketentuan jam yang diperbolehkan untuk meletakkan sampah yaitu dibawah jam 18.00. Untuk meminimalisir aroma mengganggu bagi pejalan kaki. Terdapat juga kontribusi/biaya pengangkatan sampah yang dibebankan oleh masing-masing rumah tangga. Adapun setiap bangunan memiliki tagihan yang berbeda, yaitu rumah biasa, kost-kostan dan warung serta toko.

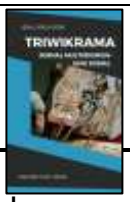
PEMBAHASAN

Penanganan sampah hingga saat ini belum memiliki keberhasilan yang baik sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah oleh karena itu pemerintah bekerja sama dengan aparat sampai pada tingkat kelurahan dengan adanya program yang mewajibkan pemilahan sampah dari sumbernya, melakukan pemilahan sampah organik dan non-organik dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang dapat menghasilkan kompos, eco-enzyme, eco-brick, dan produk bernilai ekonomis dan kegiatan program JUMPA JAS (Jumat Pagi Angka Sampah). Sedangkan pada Kelurahan Bahu sendiri pengangkatan sampah setiap pagi di jam 06.00 pagi dan masyarakat diberikan himbauan untuk melakukan pemilahan sampah sisa makanan dan sampah plastik, sebelum meletakkan sampah di depan rumah atau pagar. Adapun ketentuan jam yang diperbolehkan untuk meletakkan sampah yaitu dibawah jam 18.00. Untuk meminimalisir aroma mengganggu bagi pejalan kaki. Adapun data pengumpulan sampah yang didapatkan oleh peneliti pada Kota Manado berjumlah 134.741,00/tahun (2024) dan Kelurahan Bahu sendiri, dimana truck sampah melakukan pengangkatan sebanyak dua kali perharinya, jika di hitung 1 truck sampah itu sebanyak 5 kubik sampah. Sehingga kelurahan Bahu menghasilkan timbulan sampah sebanyak 10 kubik perharinnya sama dengan 2 ton/hari dan yang dikelola dalam hal ini sampah plastik sekitar 10-20% atau sama dengan 0,2 ton- 0,4 ton/hari yang dikelola. Sehingga 90-80% sampah atau sekitar 1,8 ton- 1,6 ton/hari yang tidak dikelola. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah implementasi kebijakan sebagai variabel Independen/bebas berpengaruh terhadap tingkat kesadaran masyarakat sebagai variabel dependen/terikat dalam penanganan sampah di Keluraahan Bahu. Berdasarkan hasil uji regresi dan koefisien korelasi menunjukan bahwa Nilai konstanta= 6.507, nilai konstanta positif menunjukan Variabel independent naik atau berpengaruh dalam satu-satuan, maka variabel Implementasi Kebijakan akan naik dan terpenuhi. Nilai Koefisien pada variabel dependen, yaitu positif menunjukkan sebesar 0.697, yang berarti Variabel Kesadaran Masyarakat dengan variabel Implementasi Kebijjakan memiliki penurunan sebesar 0.697. dan nilai R sebesar 0.702 yang dimana semakin mendekati 1, sehingga dapat diartikan berpengaruh kuat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan memiliki pengaruh terhadap tingkat Kesadaran Masyarakat dalam penanganan sampah di Kelurahan Bahu. Sehingga menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun hasil Uji T menunjukan bahwa berdasarkan pengujian yang dilakukan baik dari penggujian letak t tabel dan hasil uji t. Letak nilai sig. yaitu sebesar 0,001 lebiih besar kecil dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 9,708 lebih besar dari nilai t tabel yaitu 1,984. Sehingga pengambilan keputusan dalam pengujian T yaitu; t hitung > t tabel atau sig.< 0,05: Tolak hipotesis nol (H_0), terima hipotesis alternantif ($H\alpha$). Memiliki arti, terdapat pengaruh Variabel X secara parsial (sendiri) dan diterima sehingga penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan antara Variabel Independen terdapat Variabel dependen. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan Implementasi Kebijakan mempengaruhi tingkat Kesadaran Masyarakat dalam penanganan sampah di Kelurahan Bahu, sehingga menjawab hipotesis pada

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10 No 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



penelitian ini. Adapun penelitian ini memiliki keterkaitan dengan Teori Implementasi Kebijakan dari Edward III, yaitu dimensi Komunikasi, Sumber Daya, Diisposisi/Sikap dan Struktur Birokrasi, sehingga dapat dilihat dari hasil observasi dilapangan, wawancara dengan yang berwenang dan diskusi dengan masyarakat, serta pengelompokkan pernyatan pada kuesioner dihasilkan sebagai berikut: a. Dimensi Komunikasi memiliki hasil bahwa informasi mengenai kebijakan penanganan sampah disampaikan dengan baik melalui Sosialisasi yang dilakukan jika ada acara sukacita dan dukacita, tak hanya itu terdapat Sosialisasi berkala yang dilakukan pemerintah Kota Manado dan himbauan,. Hal ini membuat kesadaran masyarakat meningkat, dimana komunikasi yang jelas membantu masyarakat terlibat dan termotivasi untuk melakukan perubah. b. Dimensi Sumber Daya , dari hasil observasi dan wawancara didapatkan bahwa ketersediaan fasilitas seperti tempat sampah yang terpisah antara sampah organik dan non organik belum terdapat di lingkungan Kelurahan sendiri, sehingga tidak mempermudah masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah. Adapun truk pengangkut, sampah yang terbatas sehingga pengangkutan sampah sangat lambat. Sehingga masyarakat sulit menjalankan kebijakan secara konsisten. Jika semua fasilitas memadahi akan membuat masyarakat tergerak untuk melakukan pemilahan sampah secara konsisten dan menerapkan kebijakan dengan semestinya. c. Dimensi Disposisi atau Sikap , peneliti menemukan bahwa sikap positif dari pejabat dan masyarakat, sehingga memiliki komitmen untuk menjaga lingkungan dan menjalankan kebijakan yang ada. Adapun hasil wawancara yang didaptkan bahwa pegawai melakukan pemilahan sampah dan mengelolah sampah sisa makanan menjadi pupuk alami yang dapat digunakan secara pribadi baik terlebih khusus untuk kesuburan tanaman sayur dan bunga. Sehingga sikap tersebut dapat diikutii oleh masyarakat agar mengelolah dan memilah sampah yang ada. Agar mampu mencapai tujuan dari kebijakan yang ada dan menghasilkan ligkungan yang lebih bersih. d. Dimensi Struktur Birokrasi, dari hasil observasi oleh peneliti di dapatkan bahwa, pembagian tugas antara petugas kebersihan, pemerintah kelurahan, dan masyarakat sudah sangat baik tetapi pelaksanaannya yang belum konsisten dan hasil wawancara menghasilkan bahwa struktur tersebut memudahkan koordinasi, sehingga kebijakan dapat dilakukan, tetapi. masyarakat merasa bahwa aturan yang konsisten dan dukungan serta kerjasama yang belum berjalan secara maksimal. Ada pun hasil yang didapatkan dari observasi dilapangan dan wawancara dengan yang berwenang dan pengelompokkan pernyatan pada kuesioner dapat dikaitkan dengan teori Kesadaran dari Notoadmojo, dengan dimensi Pengetahuan, Perilaku dan Sikap dihasilkan sebagai berikut: a. Dimensi Pengetahuan, didapatkan bahwa masyarakat di Kelurahan Bahu memahami pentingnya penanganan sampah tetapi pelaksanaannya belum konsisten. Melalui wawancara, masyarakat mengatakan bahwa mereka belajar tentang cara memilah sampah organik dan non-organik, dan akibat yang dihasilkan sampah bagi lingkungan dan dari sosialisasi maupun himbauan dari pegawai kelurahan. Dimana sebelumnya banyak yang tidak tahu cara yang benar untuk pengelolaan sampah dan pemilahan yang baik. b. Dimensi Perilaku, dari hasil observasi di dapatkan bahwa perilaku masyarakat berubah lebih baik setelah adannya sanksi dari adannya kebijakan, tetapi didapati masih ada yang melanggar dengan membuang sampah tidak pada tempatnya. dan pemilahan yang belum dijalankan secara konsisten. Masyarakat juga ikut serta dalam gotong royong membersihkan lingkungan, tetapi tidak semua. Sehingga kesadaran masyarakat belum begitu baik. c. Dimensi Sikap, penelitian menemukan bahwa sikap masyarakat terhadap penanganan sampah menjadi lebih positif dan mendukung. Pada hasil pengelompokkkan pernyataan didapatkan bahwa, masyarakat merasa bertanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan, karena kebijakan membuat mereka melihat manfaat langsung seperti lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Sikap ini dapat berkembang jika menjalankan peraturan dengan konsisten. Sehingga temuan dalam penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa Alya Puspita, Ike Rachmawati dan Hegia Sampurna. dengan judul Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Terhadap Partisipasi Masyarakat di Kota Sukabumi ((Puspita et al., 2023) yaitu terdapat



pengaruh positif dan signifikan implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang berdasar pada dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap partisipasi masyarakat dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari Edward III (Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi/Sikap dan Struktur Birokrasi) dan pada penelitian yang dilakukan oleh (Budiharjo, 2017). Pengaruh Kesadaran Masyarakat Terhadap Partisipasi Penanganan Kebersihan Lingkungan di Kelurahan Menteng Jakarta Pusat. Yaitu temuan dari penelitian ini bahwa variabel kesadaran masyarakat berpengaruh positif cukup terhadap variabel partisipasi masyarakat di Kelurahan Menteng Jakarta Pusat dengan menggunakan teori Notoatmojo (Pengetahuan, Perilaku dan Sikap). Pada teori P. Sabatier dan Mazmanian, 1980 mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah proses memantau apa yang terjadi setelah program resmi diluncurkan, termasuk semua kegiatan dan peristiwa yang terjadi setelah program tersebut disetujui oleh pemerintah, baik yang secara langsung terkait maupun yang bertujuan untuk memberikan pengaruh tertentu terhadap masyarakat. Sehingga dalam temuan ini implementasi kebijakan memiliki peran dalam memberikan pengaruh kepada tingkat kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah di Kelurahan Bahu. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu sampel hanya 99 masyarakat dibandingkan populasi warga Kelurahan Bahu berjumlah 7439 jiwa dengan sistem sample random atau acak sehingga lebih mendominasi pada lingkungan tertentu saja dan tidak merata. Adapun pada keterbatasan waktu peneliti hanya 1 Bulan pengumpulan data responden, sehingga terdapat perubahan yang terjadi baik secara pola perilaku maupun kesadaran masyarakat dan tidak dapat digunakan untuk jangka panjang. Oleh karena itu dapat diperkuat oleh hasil uji validitas dan reliabilitas yang telah dilakukan oleh peneliti dan dapat dikatakan valid dan reliabel. Adapun keterbatasan tersebut dapat ditangani dengan triangulasi data baik secara sumber, metode, waktu, teori dan sumber data serta teknik pengumpulan data.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menemukan bahwa masalah penanganan sampah di Kelurahan Bahu sangat kompleks dan belum terselesaikan dengan baik. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan kebijakan sangat memengaruhi kesadaran masyarakat. Penelitian menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari Edward III, yang meliputi empat dimensi: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi atau Sikap, dan Struktur Birokrasi. Temuan didasarkan pada observasi lapangan, wawancara, dan analisis kuesioner. Pada dimensi Komunikasi, informasi kebijakan disampaikan melalui sosialisasi di acara adat dan himbauan rutin dari pemerintah Kota Manado, yang membantu meningkatkan kesadaran dan motivasi masyarakat. Dimensi Sumber Daya menunjukkan bahwa fasilitas seperti tempat sampah terpisah dan truk pengangkut masih kurang, sehingga sulit bagi masyarakat memilah sampah dengan baik. Dimensi Disposisi atau Sikap menunjukkan sikap positif dari pejabat dan masyarakat, seperti memilah sampah dan membuat pupuk dari sisa makanan, yang bisa dijadikan contoh. Dimensi Struktur Birokrasi menunjukkan pembagian tugas yang baik antara petugas, pemerintah, dan masyarakat, meskipun pelaksanaannya belum konsisten. Penelitian juga menghubungkan temuan dengan teori Kesadaran dari Notoadmojo, yang mencakup dimensi Pengetahuan, Perilaku, dan Sikap. Masyarakat di Kelurahan Bahu memahami pentingnya penanganan sampah melalui sosialisasi, meskipun pelaksanaannya belum rutin. Perilaku mereka membaik dengan adanya sanksi, tapi masih ada yang membuang sampah sembarangan. Sikap masyarakat lebih positif dan peduli terhadap lingkungan berkat kebijakan. Secara keseluruhan, penanganan sampah memerlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk hasil jangka panjang. Pemerintah menerapkan program berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021, yang meningkatkan kesadaran masyarakat dan membantu mencapai tujuan kebijakan. Meski penelitian ini memiliki keterbatasan, ia memberikan dasar untuk pengelolaan sampah yang lebih efektif dan mendorong partisipasi masyarakat agar lingkungan lebih bersih.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10 No 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Sarannya adalah tingkatkan komunikasi dengan sosialisasi rutin dan jelas tentang kebijakan penanganan sampah, bukan hanya saat acara khusus, agar masyarakat lebih paham dan ikut serta. Sediakan sumber daya yang cukup, seperti tempat sampah terpisah dan truk pengangkut, di setiap lingkungan, sehingga masyarakat mudah memilah dan membuang sampah dengan benar. Dorong sikap positif dengan memberikan contoh baik dari pejabat, seperti memilah sampah sendiri dan mengolahnya menjadi pupuk, agar masyarakat terinspirasi menjaga lingkungan. Serta Perbaiki struktur birokrasi dengan pembagian tugas yang konsisten antara petugas, pemerintah, dan masyarakat, serta aturan jelas dan dukungan kerjasama maksimal, untuk membuat kebijakan lebih efektif. Lanjutkan program berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah secara ketat, dan evaluasi hasilnya secara berkala untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Untuk Masyarakat, tingkatkan pengetahuan dengan memahami cara memilah sampah organik dan non-organik melalui sosialisasi, sehingga tahu pengelolaan yang benar dan dampak sampah terhadap lingkungan, serta adanya perubahan paradigma baru. Ubah perilaku dengan membuang sampah di tempat tepat, ikut gotong royong membersihkan lingkungan, dan hindari membuang sembarangan, meski ada sanksi, agar kebiasaan baik ini konsisten. Kembangkan sikap positif dengan merasakan tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan, karena kebijakan membantu melihat manfaat langsung seperti lingkungan yang lebih bersih dan sehat, serta ikuti aturan dengan konsisten untuk mendukung perubahan. Serta terlibat aktif dalam program pemerintah, seperti memilah sampah di rumah dan mengolah sisa makanan menjadi pupuk, agar penanganan sampah berjalan jangka panjang dan bermanfaat untuk semua.

5. DAFTAR PUSTAKA

Budiharjo. Pengaruh kesadaran masyarakat terhadap partisipasi penanganan kebersihan lingkungan di Kelurahan Menteng Jakarta Pusat. *Public Administration Journal*. 2017.

Cheema GS, Rondinelli DA. *Decentralization and development: Policy implementation in developing countries*. 1983. p. 26–32.

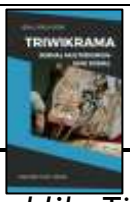
Debrah JK, Vidal DG, Dinis MAP. Raising awareness on solid waste management through formal education for sustainability: A developing countries evidence review. *Recycling*. 2021;6(1):1–21.

Yuliah E. Implementasi kebijakan pendidikan. *At-Tadbir*. 2020;30:129–153.

Fauzan A. Model implementasi kebijakan publik. 2024;4:17929–17938.

Edwards GC III. *Implementing public policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press; 1980. p. 150.

Haryono E, Slamet DM, Septian D. *Buku statistika SPSS*. Rismawati N, editor. Bandung: Widina; 2023.



Hasbi I, Hartoto, Maharani D, Sriyani, Latifah ED, Mahardhani AJ, et al. *Kebijakan publik*. Tim penyusun. 2016.

Kertati I, Harsoyo, Pratomo S, Sancono BAW, Daeni M, Widyastomo RP, et al. *Implementasi kebijakan publik: Dari hulu ke hilir*. Juansa A, Efitra S, editor. Jakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia; 2023.

Kilis N, Masengi EE, Mokat JEH. Pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado. 2024;3(6):8581–8597.

Pramono J. Implementasi dan evaluasi kebijakan publik. Dalam: *Kebijakan publik*. 2020.

Puspita KA, Rachmawati I, Sampurna H. Pengaruh implementasi kebijakan pengelolaan sampah terhadap partisipasi masyarakat di Kota Sukabumi. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*. 2023;14.

Sarosa W, Simanjuntak H, L dan H. Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penataan ruang. 2021.

Subianto A. *Kebijakan publik: Tinjauan perencanaan, implementasi dan evaluasi*. 2020.

Sugiyono. *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R dan D*. Bandung: Alfabeta; 2020.

Rachmawati WC. *Promosi kesehatan dan ilmu perilaku*. 2019.